



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**KOTA MOJOKERTO**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto selama Tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

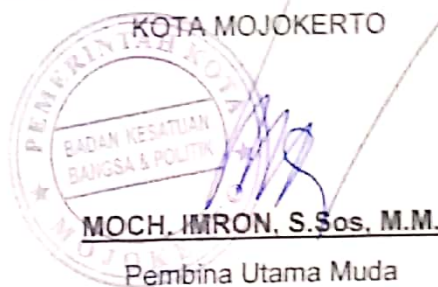
Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2022 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MOJOKERTO



**MOCH. IMRON, S.Sos, M.M.**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19720828 199201 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	3
C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	4
D. Landasan Hukum .....	6
E. Sistematika .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
1. Visi, Misi .....	9
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	16
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	18
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	19
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	21
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	21
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	24
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	36
B. Reakisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Rekomendasi Tindak Lanjut .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	11
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	12
Tabel III.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.	16
Tabel III.2	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	18
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	20
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab/Kota Lain dengan Bakesbangpol .....	21
Tabel III.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	22
Tabel III.6.1	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	25
Tabel III.6.2	Capaian Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan .....	27
Tabel III.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.	37
Tabel III.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	40

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran 1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto .....	4
------------	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional dan mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

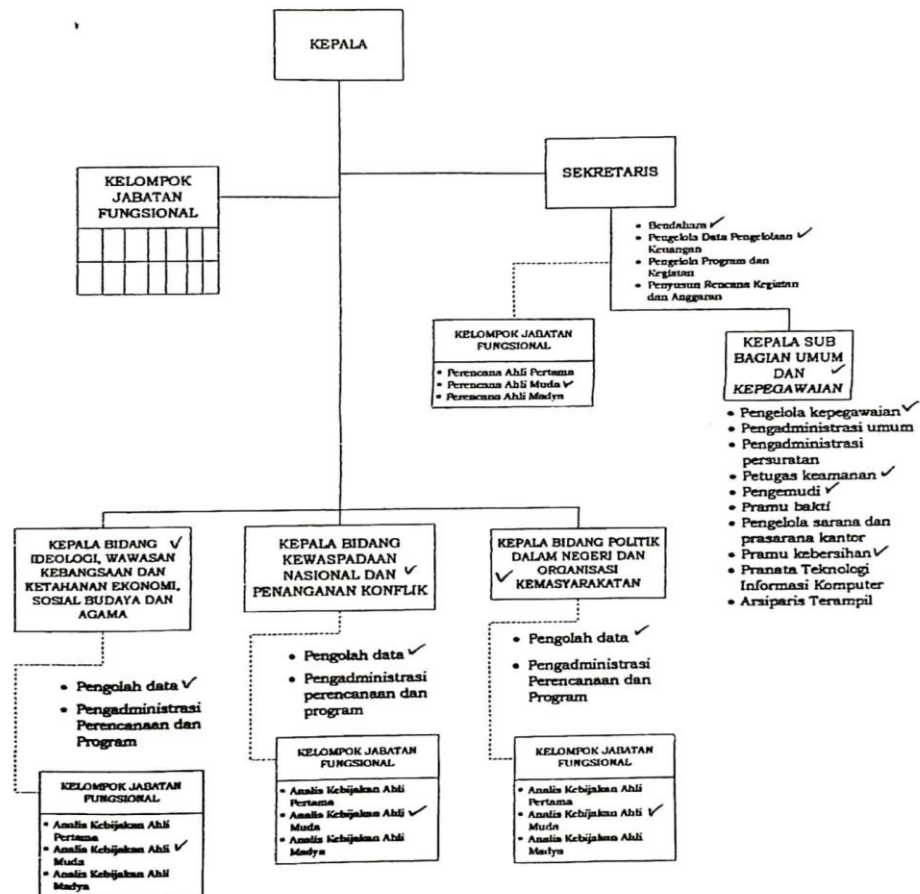
Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan



- e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana terlampir (lampiran 1)



### C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu :

- 1 Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik
- 2 Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- 3 Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat
- 4 Pembangunan infrastruktur perkotaan
- 5 Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial
- 6 Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam

pembangunan

7 Peningkatan kapasitas atas hukum, keamanan, stabilitas dan partisipasi politik

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah prioritas ke lima dan tujuh yaitu peningkatan kerukunan antar umat beragama dan solidaritas sosial serta masyarakat yang bermoral ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas, memiliki kualitas keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial. Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan serta pengawasan dan pengendalian perilaku menyimpang, selain itu Kota Mojokerto juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

Terkait dengan Isu-isu strategis dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Adapun permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diantaranya :

- a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah;
- b. Masih adanya terjadi konflik horizontal di masyarakat yang berkaitan dengan IPOLEKSSOBUD;
- c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.
- d. Masih rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program – program Pemerintah Daerah

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan strategi yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD

1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

- b. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan politik serta perluasan informasi publik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegahdini terhadap gangguan kamtibmas.
- d. Pemberdayaan Ormas/LSM dalam rangka pembangunan di daerah.

Dengan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tersebut di atas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan.
- b. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui forum-forum (FKDM,FKUB dan FPK).
- d. Peningkatan Peningkatan pembinaan terhadap Ormas/LSM melalui sosialisasi.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2022 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

## **E. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- D Landasan Hukum
- E Sistematika

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A Rencana Strategis

- 1 Visi, Misi
- 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### B Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A Capaian Kinerja Organisasi

- 1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### B Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

### A Kesimpulan

### B Rekomendasi Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018 – 2023, Visi dan Misi Perangkat Daerah mengikuti visi dan misi Walikota, yaitu :

#### **1. VISI MISI**

➤ Visi :

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

➤ Misi :

- Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Badan Kesatuan Bbangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada Misi 5 yaitu :

**“ Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”**

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**TABEL II.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-
			Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	-	-	-	100%	100%
			Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32.69%	67.29%	68.55%	69.49%	70.44%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	-	-	BB	80	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85.18	86.09	86.17
			Indeks Manajemen Resiko	-	-	1	2	3
			Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	-	-	-	100%	-



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan Walikota Mojokerto Tahun 2022, sebagai berikut :

**TABEL II.2.**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	69.49%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.09
		Indeks Manajemen Resiko	2
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,042,867,931
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	655,636,250
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	753,676,558
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	135,508,850
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	459,654,180
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,067,137,770
<b>JUMLAH</b>		<b>7,114,481,539</b>

Untuk mencapai target sasaran tersebut, didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Sub Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
  - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- *Kegiatan* : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- *Sub Kegiatan* :
  - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah
- Sub Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Sub Kegiatan :
  - a. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menggunakan suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran, target, realisasi dan persentase pencapaian. Hasil pengukuran kinerja dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Bakesbangpol Kota Mojokerto yang menyajikan target tahun 2022 dan realisasi indikator sasaran tahun 2022.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

**TABEL III.1.**  
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2022**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target Akhit Tahun 2023	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	70.44%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	75.75	81	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.39	86.17	100%
		Indeks Manajemen Resiko	1.5	Level 3	100%
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%	-	-

- a. Target terhadap indikator kinerja Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) adalah 100%, Pada tahun 2022 terdapat potensi konflik sebanyak 18 kejadian unjuk rasa. Dari kejadian tersebut telah diselesaikan secara keseluruhan.

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

- $\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100 \%$

Jumlah potensi konflik yang terjadi

- $\frac{18}{18} \times 100 \% = 100 \%$

18

- b. Penetapan target untuk Persentase konflik SARA yang diselesaikan adalah 100% dan realisasi dari target dimaksud sebesar 100%. Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik SARA yang diselesaikan dibanding jumlah potensi konflik SARA yang ada dikali 100%, dengan target 100 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 100 %, jadi pada Tahun 2021 tidak ada konflik yang terjadi.

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

- $\frac{\text{Jumlah konflik SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik SARA}} \times 100 \%$

Jumlah potensi konflik SARA

- $\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$

0

- c. Penetapan target untuk indikator Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan adalah 100 % dan realisasi dari target dimaksud sebesar 100 %. Target IKU dimaksud adalah Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibanding jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada dikali 100 % dengan target 69,49% terealisasi 69,49%, sehingga diperoleh capaian 100 %.

Formula yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah

- $\frac{\text{Jml LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100 \%$

Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut :

**TABEL III.2.**

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	92.86%	92.86%	100%	92.86%	92.86%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32.69%	32.69%	100%	67.29%	67.29%	100%	68.55%	68.55%	100%	69.49%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	75.75	94.69%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.09	85.39	99.19%
		Indeks Manajemen Resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.5	75%
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, sebagaimana tabel berikut :



**TABEL III.3.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target Akhir Tahun 2023	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	75.75	81	93.52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.39	86.17	99.09%
		Indeks Manajemen Resiko	1.5	Level 3	50%
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%		

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

**TABEL III.4.**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN**  
**STANDAR NASIONAL/PROVINSI/KAB/KOTA LAIN DENGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standart Nasional	Standart Daerah Lain
1	2	3	4	5	6
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	-	-
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	-	-
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	75.75	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.39	-	-
		Indeks Manajemen Resiko	1.5	-	-
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

**TABEL III.5.**  
**ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kota Mojokerto agar tetap kondusif,</li> <li>2. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal</li> <li>3. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terwujudnya situasi dan kondisi kota yang kondusif</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergi pada semua state holder yang mantap dan solutif</li> <li>5. Masih adanya potensi kejadian konflik</li> <li>6. Adanya mobilitas yang cukup tinggi di Kota Mojokerto yang berdampak terhadap potensi perubahan sosial masyarakat</li> </ol>	Melalui perwujudan situasi dan kondisi yang kondusif, serta terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman yang memanfaatkan semua komponen masyarakat, Pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, kriminalitas, paham radikalisme serta membangun stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman yang berkualitas
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ideologi dan karakter kebangsaan	Peningkatan dan pengembangan ideologi dan karakter kebangsaan kepada semua elemen masyarakat

					Optimalisasi pelaksanaan program ketahanan ekonomi sosial budaya	Pengembangan pelaksanaan program ketahanan ekonomi sosial budaya dengan perangkat daerah terkait
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	69.49%	100%	1. Masih mininya masyarakat yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	1. Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat
					2. Belum optimalnya masyarakat yang mendapatkan hak politik	2. Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Ormas/LSM oleh tim monev Bakesbangpol
					3. Belum semua ormas /LSM yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	80	75.75		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.09	85.39		
		Indeks Manajemen Resiko	2	1.5		
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%	100%		

#### 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel-tabel di bawah ini :

**TABEL III.6.1.**  
**PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	1,067,137,770	678,922,500	63.62%	36.38%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	1,115,290,430	893,583,500	80.12%	19.88%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	69.49%	69.49%	100%	889,185,408	794,704,600	89.37%	10.63%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	80	75.75	94.69%	4,042,867,931	3,501,979,626	86.62%	13.38%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.09	85.39	99.19%				
		Indeks Manajemen Resiko	2	1.5	75.00%				
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%	100%	100%				

Total anggaran belanja langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.114.481.539,- dari total anggaran tersebut sebesar Rp.4.042.867.931,- atau sekitar 56,83% merupakan kegiatan rutin Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.071.613.608,- atau sekitar 43,17% digunakan untuk belanja kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan organisasi.

**TABEL III.6.2.**  
**CAPAIAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>4,042,867,931</b>	<b>3,501,979,626</b>	<b>86.62%</b>	<b>13.38%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>37,130,330</b>	<b>8,342,000.00</b>	<b>22.47%</b>	<b>77.53%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100 %	37,130,330	8,342,000.00	22.47%	77.53%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>2,927,773,094</b>	<b>2,638,414,408.00</b>	<b>90.12%</b>	<b>9.88%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 transaksi	14 transaksi	100 %	2,909,951,414	2,620,930,408.00	90.07%	9.93%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100 %	14,980,000	14,980,000.00	100.00%	0.00%



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2,841,680	2,504,000.00	88.12%	11.88%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>651,467,255</b>	<b>483,831,175.00</b>	<b>74.27%</b>	<b>25.73%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	8,860,500	8,850,000.00	99.88%	0.12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	46,756,105	31,559,150.00	67.50%	32.50%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	42,931,650	42,129,645.00	98.13%	1.87%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100 %	31,119,000	31,119,000.00	100.00%	0.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	12 bulan	100 %	17,730,000	16,200,000.00	91.37%	8.63%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %	504,070,000	353,973,380.00	70.22%	29.78%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	-	-	-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>251,542,002</b>	<b>231,193,343.00</b>	<b>91.91%</b>	<b>8.09%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	79,942,002	62,909,183.00	78.69%	21.31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %	171,600,000	168,284,160.00	98.07%	1.93%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>174,955,250</b>	<b>140,198,700.00</b>	<b>80.13%</b>	<b>19.87%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100 %	156,115,250	121,358,700.00	77.74%	22.26%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100 %	18,840,000	18,840,000.00	100.00%	0.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-

2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	5.04 %	5.04 %	100 %	655,636,250	486,739,000.00	74.24%	25.76%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26 kali	26 kali	100 %	655,636,250	486,739,000.00	74.24%	25.76%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26 kali	26 kali	100 %	655,636,250	486,739,000.00	74.24%	25.76%
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	69.49 %	69.49 %	100 %	753,676,558	724,628,300.00	96.15%	3.85%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	9 parpol 1 kali keg	9 parpol 1 kali keg	100 %	753,676,558	724,628,300.00	96.15%	3.85%

	<b>Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah</b>							
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 laporan pemantauan	9 laporan pemantauan	100 %	753,676,558	724,628,300.00	96.15%	3.85%
		9 parpol yag dibina 1 keg bimtek keu parpol	9 parpol yag dibina 1 keg bimtek keu parpol	100 %				
		200 org peserta pendidikan politik	200 org peserta pendidikan politik	100 %				
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>69.49 %</b>	<b>69.49 %</b>	<b>100 %</b>	<b>135,508,850</b>	<b>70,076,300.00</b>	<b>51.71%</b>	<b>48.29%</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>16 ormas</b>	<b>16 ormas</b>	<b>100 %</b>	<b>135,508,850</b>	<b>70,076,300.00</b>	<b>51.71%</b>	<b>48.29%</b>
	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100 %	135,508,850	70,076,300.00	51.71%	48.29%
		100 Jumlah peserta yg dibina dalam jambore	100 Jumlah peserta yg dibina dalam jambore	100 %				
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	100 %				
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>459,654,180</b>	<b>406,844,500.00</b>	<b>88.51%</b>	<b>11.49%</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>24 kali</b>	<b>24 kali</b>	<b>100 %</b>	<b>459,654,180</b>	<b>406,844,500.00</b>	<b>88.51%</b>	<b>11.49%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	100 %	459,654,180	406,844,500.00	88.51%	11.49%
1 Hibah FKUB		1 Hibah FKUB	100 %					
5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika		5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	100 %					
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1,067,137,770</b>	<b>678,922,500.00</b>	<b>63.62%</b>	<b>36.38%</b>

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>42 Kali</b>	<b>42 kali</b>	<b>100 %</b>	<b>1,067,137,770</b>	<b>678,922,500.00</b>	<b>63.62%</b>	<b>36.38%</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	100 %	648,632,020	536,142,500.00	82.66%	17.34%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	100 %	92,973,200	58,000,000.00	62.38%	37.62%

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	18	Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	10	Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	56 %	325,532,550	84,780,000.00	26.04%	73.96%	
<b>JUMLAH</b>								<b>7,114,481,539</b>	<b>5,869,190,226.00</b>	<b>82.50%</b>	<b>17.50%</b>



Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja utama pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 678.922.500,- atau sekitar 63,62%
  2. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase konflik SARA yang diselesaikan adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 893.583.500,- atau sekitar 80,12%
  3. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang diselesaikan adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 794.704.600,- atau sekitar 89,37%
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.  
Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL III.7.**  
**ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani</b>	100 %	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	Menunjang
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi</b>	100 %	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan	100 %	Menunjang
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase konflik SARA yang ditangani</b>	100 %	Menunjang

				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	100 %	Menunjang
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif</b>	100 %	Menunjang
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah</b>	<b>Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.</b>	100 %	Menunjang
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase LSM/Ormas yang aktif</b>	100 %	Menunjang
				<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah LSM/Ormas yang dibina dan dimonitoring</b>	100 %	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai SAKIP	94.69%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100 %	Menunjang

Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99.19%	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun</b>	100 %	Menunjang
	Indeks Manajemen Resiko	75%	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</b>	100 %	Menunjang
	Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	100%	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	100 %	Menunjang
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	100 %	Menunjang
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	100 %	Menunjang
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu</b>	100 %	Menunjang
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana</b>	100 %	Menunjang

## B. REALISASI ANGGARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL III.8.**  
**CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,042,867,931</b>	<b>3,501,979,626</b>	<b>86.62%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37,130,330</b>	<b>8,342,000.00</b>	<b>22.47%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,130,330	8,342,000.00	22.47%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,927,773,094</b>	<b>2,638,414,408.00</b>	<b>90.12%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,909,951,414	2,620,930,408.00	90.07%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14,980,000	14,980,000.00	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,841,680	2,504,000.00	88.12%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>651,467,255</b>	<b>483,831,175.00</b>	<b>74.27%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,860,500	8,850,000.00	99.88%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,756,105	31,559,150.00	67.50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,931,650	42,129,645.00	98.13%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,119,000	31,119,000.00	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,730,000	16,200,000.00	91.37%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504,070,000	353,973,380.00	70.22%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>251,542,002</b>	<b>231,193,343.00</b>	<b>91.91%</b>

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,942,002	62,909,183.00	78.69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171,600,000	168,284,160.00	98.07%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>174,955,250</b>	<b>140,198,700.00</b>	<b>80.13%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156,115,250	121,358,700.00	77.74%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,840,000	18,840,000.00	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>655,636,250</b>	<b>486,739,000.00</b>	<b>74.24%</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	655,636,250	486,739,000.00	74.24%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	655,636,250	486,739,000.00	74.24%
<b>3</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>753,676,558</b>	<b>724,628,300.00</b>	<b>96.15%</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	753,676,558	724,628,300.00	96.15%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	753,676,558	724,628,300.00	96.15%
<b>4</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>135,508,850</b>	<b>70,076,300.00</b>	<b>51.71%</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	135,508,850	70,076,300.00	51.71%

	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	135,508,850	70,076,300.00	51.71%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>459,654,180</b>	<b>406,844,500.00</b>	<b>88.51%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>459,654,180</b>	<b>406,844,500.00</b>	<b>88.51%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	459,654,180	406,844,500.00	88.51%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1,067,137,770</b>	<b>678,922,500.00</b>	<b>63.62%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1,067,137,770</b>	<b>678,922,500.00</b>	<b>63.62%</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	648,632,020	536,142,500.00	82.66%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	92,973,200	58,000,000.00	62.38%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	325,532,550	84,780,000.00	26.04%
<b>JUMLAH</b>		<b>7,114,481,539</b>	<b>5,869,190,226.00</b>	<b>82.50%</b>

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 4.042.867.931,- yang terserap Rp.3.501.979.626,- atau sekitar 86,62% dari pagu anggaran;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan anggaran sebesar Rp. 655.636.250,- yang terserap Rp.486.739.000,- atau sekitar 74,24% dari pagu anggaran;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 753.676.558,- terserap Rp.724.628.300,- atau sekitar 96,15% dari pagu anggaran;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 135.508.850,- terserap Rp. 70.076.300,00 atau sekitar 51,71% dari pagu anggaran; Hal ini disebabkan karena situasi masih pandemi covid-19 sehingga kegiatan jambore Ormas yang sedianya dilaksanakan di lapangan tidak bisa dilaksanakan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp[.459.654.180,- terserap Rp. 406.844.500,- atau sekitar 88,51% dari pagu anggaran;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.067.137.770,- terserap Rp. 678.922.500,- atau sekitar 63,62% dari pagu anggaran. Untuk kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota, prosentase penyerapan tidak maksimal karena terkendala oleh sulitnya menyatukan jadwal para pimpinan.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP} disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan dan perencanaan tahun berikutnya.

### **A. KESIMPULAN**

Secara global hasil pelaksanaan program/kegiatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun 2022 berdasarkan hasil analisis capaian kinerja menunjukkan telah tercapainya indikator sasaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 82,50%, meskipun masih dijumpai adanya beberapa permasalahan, kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang.

### **B. REKOMENDASI TINDAKLANJUT**

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang semaksimal mungkin, maka ke depan diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi tinggi dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto;
2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Mojokerto tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders, maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

3. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward dan punishment yang tegas dan ketat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MOJOKERTO



**MOCH/IMRON, S.Sos. M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720828 199201 1 001